

## Gorontalo dan Perangkap Kemiskinan

**K**EMISKINAN merupakan sesuatu yang tidak habis-habisnya dibicarakan karena menyangkut kehidupan manusia juga secara kodrati di dunia ini Tuhan selalu menciptakan sesuatu berpasangan yaitu ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada susah ada senang demikian pula ada kaya pasti ada yang miskin.

Masalah kemiskinan selain tidak habis-habisnya dibahas juga menarik menjadi bahan diskusi karena berkaitan dengan kesuksesan suatu pemerintahan dalam melaksanakan programnya untuk pengentasan kemiskinan.

Dari besaran angka kemiskinan dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah berhasil melaksanakan amanah rakyat atau tidak dalam pengentasan kemiskinan.

Secara etimologis kemiskinan berasal dari kata "Miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosialis dan Biro Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2012).

Secara lebih rinci penentuan kemiskinan digunakan angka Garis kemiskinan (GKM) dimana untuk mendeteksi seseorang termasuk miskin atau tidak dideteksi jumlah pendapatannya dengan mengukur jumlah

baik konsumsi makanan yang setara dengan 2.100 kalori maupun pengeluaran non makanan. Untuk daerah Gorontalo pada Maret 2016 GKM sebesar Rp. 284.232,- per kapita per bulan.

Secara periodik BPS melakukan survey menentukan pergerakan persentase kemiskinan dari waktu ke waktu. Seorang ahli ekonomi bernama Ragnar Nurkse tahun 1953 telah mendeteksi pergerakan persentase kemiskinan pada beberapa negara berkembang dan menyimpulkan bahwa ada negara yang sangat sukar keluar dari wilayah kemiskinan yang disebutnya sebagai terperangkap dalam kemiskinan (vicious cycle).

Perangkap kemiskinan menggambarkan kondisi masyarakat yang memiliki produktifitas rendah, berakibat pada pendapatannya rendah sehingga tabungan rendah, pendidikan rendah, derajat kesehatan rendah, investasi rendah akhirnya berdampak kembali pada produktifitas rendah dan pendapatan rendah. Negara yang terperangkap dalam kemiskinan sangat sukar menetapkan kebijakan yang benar-benar bisa



Oleh  
Dr. Fahrudin Z. Ollingo, SE, M.Si

memotong perangkap sehingga negara yang bersangkutan terbebas dari jeratan kemiskinan.

Misalnya untuk meningkatkan produktifitas dikeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pendidikan maupun dengan memberikan bantuan pemberdayaan dan lain-lain sebagainya namun semuanya gagal karena angka kemiskinan penurunannya tidak signifikan. Dalam tulisan ini ingin disimak pergerakan kemiskinan di Provinsi Gorontalo apakah sudah masuk dalam perangkap atau tidak.

Sesuai publikasi data statistik pergerakan persentase kemiskinan di Provinsi Gorontalo dapat disimak pada tabel. Dari data dalam tabel sampai dengan tahun 2016 dapat disimak terkecuali Kota Gorontalo ada 3 kabupaten yang prosentase

kemiskinannya di atas 20 % yaitu Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dan Boalemo, sedangkan Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara berkisar 17 sd 18 % (mendekati 19 %).

Secara umum dalam 7 tahun terakhir pada 5 kabupaten dan kota pergerakan kemiskinan relatif stagnan naik maupun turun dengan kisaran 1 % dan dengan demikian ada kecenderungan daerah ini sudah masuk dalam perangkap kemiskinan.

Semua kebijakan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis pemberian bantuan langsung maupun tidak langsung tidak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Hal ini akan diperparah dengan adanya kebijakan maraknya memasukkan Alfamart dan Indomaret ke wilayah Gorontalo saat ini berpotensi memukul UMKM dan malah melanggengkan angka kemiskinan.

Perlu pengkajian yang lebih mendalam tentang efektifitas paket kebijakan pengentasan kemiskinan mungkin hanya bersifat mengobati ketimbang menghilangkan penyebabnya, atau kebijakan cenderung

hanya memberikan ikan daripada memberikan kail untuk menangkap ikan.

Adi Sasono (1998) melihat kemiskinan dari dua sudut pandang yaitu karena struktural dan kultural.

Sudut pandang struktural karena daerahnya memang miskin kebijakan apapun susah untuk diterapkan seperti negara-negara di kawasan Afrika yang memang daerahnya kering dan tandus.

Dari sudut pandang ini Gorontalo termasuk daerah yang cukup memiliki potensi hanya dibutuhkan kebersamaan dan efektifitas pemanfaatan potensi yang ada.

Sudut pandang kultural karena budaya miskin seperti malas, pasif, hidup subsisten mungkin masih ada ditengah-tengah kita.

Yang sulit bila budaya ini juga hidup dikalangan aparat yang cenderung tidak serius, tidak fokus dalam mengentaskan kemiskinan. Ada kecenderungan pengentasan kemiskinan di daerah ini bukan menjadi program bersama yang terintegrasi tetapi kesannya masing-masing SKPD memiliki program masing-masing pada objek yang sama sehingga tidak fokus dan tumpang tindih.

Yang sangat ironi kesannya upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah kadang hanya jadi dagelan politik belaka.

\*Penulis Dosen  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri

Prosentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Boalemo	19,82	21,90	20,42	21,79	20,79	21,67	21,11
Gorontalo	18,87	21,31	20,79	21,57	21,05	21,80	21,03
Pohuwato	18,73	21,58	20,18	21,47	20,69	22,43	21,17
Bone Bolango	17,64	17,39	16,87	17,19	16,68	18,49	17,97
Gorontalo Utara	19,58	19,22	18,54	19,16	18,34	18,93	18,51
Kota Gorontalo	5,49	5,97	5,61	5,99	5,85	6,05	6,05
Provinsi Gorontalo	16,55	18,02	17,22	18,00	17,41	18,32	17,72